SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 100-106

Analisis Kebijakan Fiskal Abu Yusuf dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial Kontemporer

Ai Siti Patimah[1], Aulia Maretsa[2], Intan Nuraeni[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
241002111009@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Abu Yusuf, Fiscal Policy, Social Welfare, Islamic Economics, Distribution Of Justice.

Abstrak

This study aims to analyze the concept of fiscal policy proposed by Abu Yusuf and examine its relevance to efforts to improve social welfare in a contemporary context. Abu Yusuf, as a prominent classical Islamic economic thinker, positions fiscal policy as a crucial instrument in creating distributive justice, economic stability, and societal prosperity. Using a qualitative approach and library research, this study examines Abu Yusuf's thoughts as outlined in his monumental work, Kitab al-Kharaj, specifically regarding the management of taxes (kharaj), zakat (alms), and other sources of state revenue. The analysis shows that Abu Yusuf's fiscal policy emphasizes the principles of justice, proportionality, public welfare, and the state's responsibility to ensure the welfare of the people. From a contemporary perspective, these ideas remain relevant for implementation, particularly in strengthening a fair tax system, optimizing wealth distribution, and increasing social protection for vulnerable groups. Thus, Abu Yusuf's fiscal thinking not only has historical value but also provides a normative contribution to the formulation of economic policies oriented toward social welfare in the modern era.

Keywords: Kebijakan Fiskal; Kesejahteraan Sosial; Ekonomi Islam; Distribusi Keadilan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Abu Yusuf serta menelaah relevansinya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial dalam konteks kontemporer. Abu Yusuf sebagai salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam klasik menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan distribusi, stabilitas ekonomi, dan kemakmuran masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji pemikiran Abu Yusuf yang tertuang dalam karya monumentalnya, Kitab al-Kharaj, khususnya terkait pengelolaan pajak (kharaj), zakat, dan sumber-sumber penerimaan negara lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal menurut Abu Yusuf menekankan prinsip keadilan, proporsionalitas, kemaslahatan publik, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif kontemporer, gagasan tersebut masih relevan untuk diterapkan,

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 100-106

terutama dalam penguatan sistem perpajakan yang adil, optimalisasi distribusi kekayaan, serta peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pemikiran fiskal Abu Yusuf tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan kontribusi normatif bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial di era modern.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama negara dalam mengatur stabilitas perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan belanja publik. Dalam teori ekonomi modern, kebijakan fiskal digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah. Namun demikian, berbagai persoalan seperti defisit anggaran yang berkelanjutan, meningkatnya utang publik, serta ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan teknis-ekonomis, tetapi juga memerlukan landasan etis dan normatif yang kuat.

Dalam khazanah ekonomi Islam klasik, Abu Yusuf (731–798 M) dikenal sebagai salah satu pemikir yang memberikan kontribusi penting dalam bidang keuangan publik melalui karyanya Kitāb al-Kharāj. Dalam karyanya tersebut, Abu Yusuf menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus dilandasi prinsip keadilan, kemaslahatan umum, serta tanggung jawab moral penguasa sebagai pengelola amanah Baitul Māl. Ia menolak praktik perpajakan yang bersifat menindas dan mendorong penerapan sistem pajak yang proporsional serta tidak memberatkan rakyat. Pengelolaan keuangan negara menurutnya bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Relevansi pemikiran Abu Yusuf semakin terlihat dalam konteks kontemporer, terutama ketika banyak negara berkembang menghadapi tantangan rendahnya rasio pajak, ketimpangan sosial, serta pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada utang. Dalam praktik kebijakan fiskal modern, pendekatan Keynesian misalnya menekankan peran aktif negara melalui ekspansi belanja dan pembiayaan defisit untuk mendorong permintaan agregat. Meskipun efektif dalam stabilisasi jangka pendek, pendekatan tersebut sering kali menimbulkan persoalan keberlanjutan fiskal dan keadilan distribusi dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal Abu Yusuf serta mengkaji relevansinya terhadap kesejahteraan sosial kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka normatif berbasis nilai-nilai ekonomi Islam dalam mengevaluasi kebijakan fiskal modern, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kajian difokuskan pada analisis pemikiran Abu Yusuf dalam Kitāb al-Kharāj terkait konsep kebijakan fiskal dan prinsip keadilan dalam sistem al-kharāj, serta relevansinya terhadap kesejahteraan sosial kontemporer. Sumber data terdiri atas data primer berupa karya asli Abu Yusuf dan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur akademik yang relevan dengan ekonomi Islam dan kebijakan fiskal modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan tema kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi konsep utama serta menilai relevansinya dalam konteks kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Fiskal Menurut Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf mengenai kebijakan fiskal berlandaskan pada prinsip bahwa negara bukanlah pemilik mutlak atas kekayaan publik, melainkan pemegang amanah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dalam karyanya Kitāb al-Kharāj, ia merumuskan kebijakan fiskal sebagai perangkat strategis yang memiliki fungsi lebih dari sekadar penghimpunan pendapatan negara. Kebijakan fiskal diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial, menciptakan keadilan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan fiskal menurut Abu Yusuf tidak hanya berdimensi teknis-administratif, tetapi juga sarat dengan nilai etis dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks penerimaan negara, Abu Yusuf mengakui keberadaan berbagai sumber pendapatan yang sah seperti kharāj, jizyah, zakat, 'usyr, fai', dan ghanīmah. Namun, perhatian utamanya tertuju pada reformasi pengelolaan kharāj, yang pada masa itu menjadi tulang punggung keuangan negara. Ia mengkritik sistem pajak tetap (misāḥah) karena dianggap tidak responsif terhadap fluktuasi hasil pertanian. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tetap membebani petani dengan jumlah pajak yang sama meskipun hasil produksi mengalami penurunan akibat faktor alam atau kondisi ekonomi tertentu.

Sebagai alternatif, Abu Yusuf mengusulkan penerapan sistem muqāsāmah, yakni mekanisme penarikan pajak berdasarkan persentase dari hasil produksi. Melalui pendekatan ini, besaran pajak secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat hasil yang diperoleh. Apabila produksi meningkat, kontribusi kepada negara meningkat; sebaliknya, ketika hasil menurun, beban pajak turut berkurang. Sistem ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dan fleksibilitas dalam kebijakan fiskal. Selain lebih adil, pendekatan tersebut juga dinilai mampu menjaga motivasi produksi masyarakat serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian sebagai basis ekonomi.

Dalam aspek pengeluaran negara, Abu Yusuf menegaskan bahwa belanja publik harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti sistem irigasi, jalan, dan fasilitas umum yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pembiayaan untuk keamanan, sistem peradilan, serta kesejahteraan aparat negara juga dipandang sebagai kebutuhan penting guna menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, kebijakan fiskal menurut Abu Yusuf berorientasi pada penciptaan kesejahteraan yang bersifat menyeluruh dan berjangka panjang.

Secara keseluruhan, konsep fiskal yang dirumuskan Abu Yusuf memperlihatkan integrasi antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral. Negara tidak diperkenankan mengejar peningkatan pendapatan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Fiskal dipahami sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan sebagai alat eksploitasi.

2. Prinsip Keadilan dalam Sistem al-Kharāj

Keadilan menempati posisi sentral dalam sistem al-kharāj yang dirancang Abu Yusuf. Ia berpendapat bahwa pajak harus dirumuskan berdasarkan prinsip keseimbangan dan proporsionalitas, bukan atas dasar kepentingan sepihak negara. Pajak yang ditetapkan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dianggap

bertentangan dengan nilai keadilan dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Melalui penerapan sistem muqāsāmah, Abu Yusuf berupaya mewujudkan keadilan distributif dalam kebijakan fiskal. Mekanisme ini memastikan bahwa beban pajak berkorelasi langsung dengan tingkat hasil produksi. Dengan kata lain, kontribusi kepada negara disesuaikan dengan kemampuan aktual wajib pajak. Model ini mencerminkan adanya pembagian risiko antara negara dan masyarakat. Dalam situasi hasil panen yang rendah, negara turut menanggung dampaknya melalui berkurangnya penerimaan pajak, sehingga risiko ekonomi tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam sistem al-kharāj tidak hanya menyangkut penetapan tarif, tetapi juga mencakup aspek administrasi dan pelaksanaan. Abu Yusuf menekankan pentingnya pengawasan terhadap aparat pemungut pajak guna mencegah praktik penyimpangan, pemerasan, maupun korupsi. Ia memandang bahwa integritas aparat fiskal merupakan prasyarat utama bagi terciptanya sistem keuangan negara yang adil. Dalam kerangka ini, penguasa memiliki tanggung jawab moral yang besar atas kebijakan dan praktik fiskal yang diterapkan.

Prinsip keadilan yang dirumuskan Abu Yusuf juga memiliki implikasi ekonomi. Pajak yang tidak proporsional dapat menurunkan insentif kerja dan merusak basis produksi, yang pada akhirnya justru merugikan negara sendiri. Oleh karena itu, keadilan dalam fiskal bukan hanya persoalan etika, tetapi juga strategi rasional untuk menjaga produktivitas dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

3. Relevansi terhadap Kesejahteraan Sosial Kontemporer

Pemikiran Abu Yusuf mengenai kebijakan fiskal tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial, kemiskinan, serta masalah keberlanjutan fiskal. Prinsip pajak yang didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat sejalan dengan konsep keadilan vertikal dalam teori perpajakan kontemporer, yang menekankan bahwa individu dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi seharusnya menanggung beban yang lebih besar secara proporsional.

Selain itu, penekanan Abu Yusuf pada prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas sangat sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada era modern. Banyak permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan penerimaan negara, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dan maraknya penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks ini, gagasan Abu Yusuf memberikan dasar normatif untuk memperkuat integritas pengelolaan keuangan publik.

Orientasi jangka panjang yang menjadi ciri kebijakan fiskalnya juga relevan dalam menghadapi persoalan defisit anggaran dan akumulasi utang negara. Abu Yusuf menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal agar kebijakan yang diambil tidak membebani generasi mendatang. Perspektif ini selaras dengan konsep keadilan antargenerasi yang berkembang dalam ekonomi publik modern.

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah, kebijakan fiskal yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan berfungsi untuk menjaga harta, melindungi kehidupan, serta menciptakan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga dapat dijadikan rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan fiskal kontemporer yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep kebijakan fiskal menurut Abu Yusuf merupakan sistem pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Dalam Kitāb al-Kharāj, kebijakan fiskal tidak diposisikan semata sebagai instrumen penghimpunan pendapatan negara, melainkan sebagai sarana strategis untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Negara dipahami sebagai pengelola amanah atas harta publik, sehingga setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dimensi moral dan tanggung jawab sosial.

Dalam sistem al-kharāj, prinsip keadilan menjadi fondasi utama. Abu Yusuf menolak sistem pajak tetap yang berpotensi memberatkan masyarakat dan menggantinya dengan sistem proporsional (muqāsāmah) yang disesuaikan dengan hasil produksi. Mekanisme ini mencerminkan keadilan distributif karena beban pajak ditentukan berdasarkan kemampuan riil wajib pajak serta mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dihadapi. Selain itu, keadilan tidak hanya tercermin dalam substansi kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaannya, melalui penekanan pada integritas aparat, transparansi, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap kesejahteraan sosial kontemporer terletak pada orientasinya yang menekankan proporsionalitas, tata kelola yang akuntabel, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan konsep keadilan vertikal dalam sistem perpajakan modern dan tuntutan good governance dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, orientasi jangka panjang yang ia tekankan sejalan dengan prinsip keadilan antargenerasi dalam ekonomi publik, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan sesaat, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan kesejahteraan.

Dengan demikian, pemikiran fiskal Abu Yusuf dapat diposisikan sebagai kerangka normatif-etis yang relevan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan fiskal modern, khususnya dalam upaya menciptakan sistem keuangan negara yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

REFERENSI

Kusumorini, F. I. (2026). Analisis Komparatif Pemikiran Fiskal Abu Yusuf dan Kebijakan Fiskal Keynesian dalam Konteks Ekonomi Kontemporer. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 9(1), 48-55. doi: (tautan tidak tersedia)

Maresca, D. A., & Nabila, R. N. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer. Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), 5(1), 73-85. doi: 10.30739/jpsda.v5i1.3637

Sifa', M. A., & Subakir, A. (2026). Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam Kitab Al-Muqoddimah dan Al-Kharaj. Jurnal ANIS, 1(2), 156-168.

Irham, M., Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., & Soliha, M. (2026). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 110-120.

Harahap, H. A., Bunda, N. A., Nasution, I. A., & Hasanah, U. (2026). Studi Ekonomi Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7(12), 4225-4235. doi: 10.47467/alkharaj.v7i12.10046

Nabila, U., Arianti, S. D., & Rahmawati, L. (2025). Operasional Bisnis Pelaku Usaha di Lingkungan Ponpes Ngalah Pasuruan Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Umar Chapra. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 1003-1020. doi: 10.47467/alkharaj.v6i1.3586

Muhit, M., & Athoillah, M. A. (2024). Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqāṣidal-Sharī'ah. AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies and Education, 3(1), 1-10.

Tazkiyah, P. A., Humaimah, N., Safitri, A., Fitrahwan, I., & Hayati, F. (2026). Pemikiran Abu Yusuf dalam Perspektif Ekonomi Islam Modern: Analisis terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Publik dan Distribusi Kekayaan. Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 1-10.